

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, S. H. *Hukum pertambangan*. Sinar Grafika, 2022.
- Amartya, Sen, and Sen Amartya. *The idea of justice*. London: Penguin Books, 2009.
- Azhar, Muhamad. Buku Ajar Hukum Pertambangan (Semarang: Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro, 2019).
- Black, Henry Campbell. *Law dictionary*. St. Paul, Minn.: West Publishing Company, 1910.
- Elsi, Sutri Destemi. *Politik Kebijakan Publik di Sektor Pertambangan*. Publica Indonesia Utama, 2023.
- Gart, Alan. "Regulation, deregulation, reregulation: the future of the banking, insurance, and securities industries." (*No Title*) (1994).
- H. S. Salim, Hukum Pertambangan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Hadjon, Philipus M., Sri Soemantri Martosoewignjo, and Sjachran Basah. "Pengantar hukum administrasi Indonesia." (2005).
- Harsono, Budi. "Hukum agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya." (*No Title*) (2007).
- Hatta, Mohammad. *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*. Mutiara, 1977.
- Hayati, Tri. *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Hidjaz, M. Kamal. *Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi, 2010.
- Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum, and Edisi Lengkap. "Universitas Atma Jaya." (2011).

- Ilmar, Aminuddin. *Hak menguasai negara dalam privatisasi BUMN*. Kencana, 2012.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Kriveld, J.H. *Beleidsregel in Het Recht*. Kluwer Law International, 1983.
- Kusumaatmadja, Mochtar. "Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan." (2002).
- Kusumohamidjojo, Budiono. "Filsafat Hukum Problematika Ketertiban Yang Adil." (2004).
- L.J Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta:Pradnya Paramita, 1980)
- Leback, Karen. *Teori-Teori Keadilan*. Diterjemahkan oleh Yudi Santoso. Cet. Ke-6. Bandung: Nusa Media, 2018
- Manan, Bagir, Mashudi, and Kuntana Magnar. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Mandar Maju, 1995.
- Manan, Bagir. *Peraturan Kebijaksanaan* (1994).
- Naffine, Ngaire, and Rosemary Owens. *Intention in Law and Philosophy*. Routledge, 2019.
- Nurmayani, S. H. "MH Hukum Administrasi Daerah." *Universitas Lampung Bandarlampung* (2009).
- Pertambangan, Indonesia Departemen. "50 tahun pertambangan dan energi dalam pembangunan." (No Title) (50).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1980.
- Rajagukguk, Erman. *Hukum Sumber Daya Alam: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Rawls, John. "Teori Keadilan: A Theory of Justice." *Pustaka Pelajar, Yogyakarta* (2006).

- Redi, Ahmad. "Hukum penyelesaian sengketa pertambangan Mineral dan Batubara." (2017).
- Ridwan, H. R. "Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers." (2018).
- Santoso, Agus. "Hukum, moral dan keadilan: Sebuah kajian filsafat hukum." (2012).
- Schlosberg, David. *Defining environmental justice: Theories, movements, and nature*. OUP Oxford, 2007.
- Simatupang, Marangin, and Soetaryo Sigit. "Pengantar Pertambangan Indonesia." *Asosiasi Pertambangan Indonesia, Jakarta* (1992).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. "Metodologi penelitian hukum dan jurimetri." *Ghalia Indonesia, Jakarta* 167 (1990).
- Sumardjono, Maria S. *Kebijakan pertanahan: antara regulasi dan implementasi*. Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Sutarjo, Sigit. "Dr, Perkembangan Pertambangan di Indonesia". (1994).
- Suteki, Galang Taufani, and Galang Taufani. "Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik)." *Depok: rajawali pers* (2018)
- Swerdlow, Irving. *The Public Administration of Economic Development*. New York: Praeger Publisher, 1975.
- Syaltout, Mahmud. "Negara Kesejahteraan dan Posisi Jawa Timur." Dalam *Pintu Gerbang MEA 2015 Harus Dibuka*, disunting oleh Soekarwo dkk.,- . Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Ten Berge, M.R.N.M., dan Philipus Hadjon, Penerjemah. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga=ga, 1992.
- Ter Braake, Alex L. *Mining in the Netherlands East Indies*. Vol. 4. Ayer Publishing, 1944.
- Weiss, Brown. "In Fairness to Future Generations: International Law Common Patrimony and Intergenerational Equity." (1989).

Yamin, Muhammad. *Proklamasi dan Konstitusi*. Jakarta; Djembatan, 1954.

Jurnal/Artikel Ilmiah

Amiruddin, Iswadi, Muhammadijah Muhammadijah, and Anwar Parawangi.

"Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Kolaka." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 1, no. 1 (2020): 312-326.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.

Castrilli, Joseph F. "Environmental regulation of the mining industry in Canada: an update of legal and regulatory requirements." *U. Brit. Colum. L. Rev.* 34 (2000): 91.

Christianto, Giso, and Riset dan Teknologi Kebudayaan. "Ratio Legis Asas Hak Menguasai Negara Terhadap Sumber Daya Mineral Dan Batubara." Magister Thesis, Universitas Borneo Tarakan (2022).

Darongke, Friskilia, Dientje Rumimpunu, and Sarah Roeroe. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia." *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022).

Endratno, Cucuk. "Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan." *Yustitiabelen* 8, no. 2 (2022): 97-117.

Fauzi, Rizki Muhammad, and Soni A. Nulhaqim. "Masalah Konflik Pertambangan Di Indonesia Mining Conflict Issues in Indonesia." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 6, no. 1 (2024): 34-41.

Hadi, Syofyan, and Tomy Michael. "Principles of defense (Rechtmatigheid) in decision standing of state administration." *Jurnal Cita Hukum. Faculty of Sharia and Law UIN Jakarta* 5, no. 2 (2017): 383-400.

- Haris, Oheo K. "Good governance (Tata kelola pemerintahan yang baik) dalam pemberian izin oleh pemerintah daerah di bidang pertambangan." *Yuridika* 30, no. 1 (2015): 58-83.
- Hayati, Tri. "Hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan implikasinya terhadap bentuk pengusahaan pertambangan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 768-787.
- Hilson, Gavin. "Corporate Social Responsibility in the extractive industries: Experiences from developing countries." *Resources policy* 37, no. 2 (2012): 131-137.
- Horowitz, Donald L. "Self-determination: Politics, philosophy, and law." *NOMOS: Am. Soc'y Pol. Legal Phil.* 39 (1997): 421.
- Husen, Achmad, Benny Yulius R. Tidja, and I. Made Astra. "Study Literature Review: Evaluasi Kebijakan Moratorium Petambangan di Indonesia."
- Januari, Achmad Haris. "Sistem Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Tata Kelola Pertambangan." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 1, no. 2 (2015): 43-65.
- Kuyek, Joan. "Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources." *Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit* (2005).
- Lathif, Nazaruddin. "Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara." *Jurnal Panorama Hukum* 2, no. 2 (2017): 149-166.
- Leksono, Arrum Budi. "Tata Kelola Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Konsep Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 4, no. 2 (2020): 189-197.
- Owen, John R., and Deanna Kemp. "Social licence and mining: A critical perspective." *Resources policy* 38, no. 1 (2013): 29-35.

- Pandiangan, Henok, and Frans Yudha. "Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Sehingga Menyebabkan Kematian." (2022).
- Putri, Putri Kemala Sari, Nila Trisna, and Dara Quthni Effida. "Tanggung jawab Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara Berdasarkan Prinsip Good Mining Practice." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 1 (2023): 108-120.
- Riqiey, Baharuddin, and Pandu Satriawan Zainulla. "Problematika Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Tambang." *SOSIALITA* 1, no. 1 (2022): 53-60.
- Sasmitha, Tody, Haryo Budhiawan, and Sukayadi Sukayadi. "Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi." (2014).
- Soemarsono, Maleha. "Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 2 (2007): 300-322.
- Taufiq, Muchamad. "Hak menguasai negara di bidang pertambangan mineral dan batubara di era otoda." *Journal Equitable* 8, no. 2 (2023): 240-270.
- Utami, Novita Eka. "Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara." *Lex Renaissance* 8, no. 2 (2023): 360-378.
- Widyaningrum, Tuti, and Muhammad Rifqi Hamidi. "Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia." *Iblam Law Review* 4, no. 3 (2024): 11-22.
- Wijoyo, Suparto. "Tata Kelola Pertambangan Dalam Kerangka Indonesia Incorporated Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan." *Jurnal Lingkungan Hidup Indonesia* 4, no. 1 (2017): 1-30.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Pemerintah Nomor 25/2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. Tahun 1999 tentang Kehutanan

Putusan MK No. 50/PUU-X/2012 tentang pengujian UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Minerba.*

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Penjelasan Umum.

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berita

Badan Pusat Statistik Provinsi Kep. Bangka Belitung, “Nilai Ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, diakses 8 Oktober 2024, <https://babel.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/1121/mei-2024--nilai-ekspor-provinsi-kepulauan-bangka-belitung-mei-2024-sebesar-us-130-64->

[juta--nilai-impor-provinsi-kepulauan-bangka-belitung-mei-2024-sebesar-us-0-48-juta-.html](#)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), “Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas,” diakses 30 Januari 2025, <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>.

"Mengulik Sejarah Pertambangan di Dunia, Seperti Apa?," *kumparan*, diakses 30 Januari 2025, <https://kumparan.com/berita-update/mengulik-sejarah-pertambangan-di-dunia-seperti-apa-21exW8ksgnN/4>.

"Sejak Kapan Sih Tambang Itu Hadir dan Dikenal di Dunia Ini?" Resvani. Diakses 30 Januari 2025. <https://resvani.com/sejak-kapan-sih-tambang-itu-hadir-dan-dikenal-di-dunia-ini/>.

"Menilik Kembali Sejarah dan Regulasi Industri Pertambangan di Indonesia," *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)*, diakses 30 Januari 2025 <https://www.walhi.or.id/menilik-kembali-sejarah-dan-regulasi-industri-pertambangan-di-indonesia>.

“Perkembangan Regulasi Pertambangan,” *Hukumonline*, diakses 30 Januari 2025, <https://rcs.hukumonline.com/insights/perkembangan-regulasi-pertambangan>.

“Mengenal Konsep Sustainable Mining” CDE, diakses 30 Januari 2025, <https://cde-coal.com/insight-trend/detail/mengenal-konsep-sustainable-mining-1-49#:~:text=Konsep%20pertambangan%20berkelanjutan%20adalah%20pendekatan,lingkungan%2C%20sosial%2C%20dan%20ekonomi>.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, "Tata Kelola yang Baik untuk Proses Penambangan yang Berkelanjutan, Efisien, dan Patuh Regulasi," *Minerba ESDM*, diakses 30 Januari 2025, <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20240926-tata->

[kelola-yang-baik-untuk-proses-penambangan-yang-berkelanjutan-efisien-dan-patuh-regulasi.](#)

“Tata Kelola Perusahaan yang Baik”, Rolas Nusantara Tambang, diakses 20 Januari 2025, https://rntambang.co.id/main/GCG/Detail_List/6/4/tata-kelola-perusahaan-yang-baik#:~:text=Dalam%20pengelolaan%20perusahaan%2C%20GCG%20merupakan,perjanjian%20dan%20peraturan%20perundang%2Dundangan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Risalah Sidang Perkara No. 25, 30, 32/PUU-VIII/2010,46/PHPU.D/2012*, diakses pada 30 Januari 2025 [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_Perkara%20No.%20%2025.%2030.%2032.PUU-VIII.2010,%2036.PHPU.D.2012%20tgl%204%20Juni%202012.pdf.](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_Perkara%20No.%20%2025.%2030.%2032.PUU-VIII.2010,%2036.PHPU.D.2012%20tgl%204%20Juni%202012.pdf)

Transparency International Indonesia. “Anomali Sentralisasi Izin Tambang; Tingginya Risiko Korupsi Hingga Lemahnya Pengawasan.” Diakses 30 Januari 2025 [https://transparansi.id/anomali-sentralisasi-izin-tambang-tingginya-risiko-korupsi-hingga-lemahnya-pengawasan/.](https://transparansi.id/anomali-sentralisasi-izin-tambang-tingginya-risiko-korupsi-hingga-lemahnya-pengawasan/)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), “Menuju 2 Tahun UU Minerba: Puluhan Warga Diskriminalisasi, Jutaan Hektar Lahan Dijarah,” diakses 15 November 2024, [https://www.walhi.or.id/menuju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah.](https://www.walhi.or.id/menuju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah)

Advokat Konstitusi, “Menilik Aneka Kontroversi dalam Pasal 162 Revisi UU Minerba, “, diakses 12 November 2024, [https://advokatkonstitusi.com/menilik-aneka-kontroversi-dalam-pasal-162-revisi-uu-minerba/.](https://advokatkonstitusi.com/menilik-aneka-kontroversi-dalam-pasal-162-revisi-uu-minerba/)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “ Tugas dan Fungsi” ESDM, diakses pada 30 Januari 202, <https://www.esdm.go.id/id/profil/tugas-fungsi>

Badan Geologi, “Website Resmi Badan Geologi Kementerian ESDM”, diakses 30 Januari 2025, <https://geologi.esdm.go.id/>

Indonesia Launches Nickel, Tin Online Tracking System," *Reuters*, 22 Juli 2024, diakses 30 Januari 2025, <https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesia-launches-nickel-tin-online-tracking-system-2024-07-22/>.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan, diakses 30 Januari 2025, <https://desdm.kalteng.go.id/berita/kepala-dinas-esdm-menghadiri-rapat-koordinasi-langkah-strategis-kebijakan-pengelolaan-sektor-esdm-bersama-asosiasi-pengelola-esdm-provinsi-se-indonesia-apesdmpi/>

“Kala Tata Kelola Karut-Marut: Kajian Sebut Sektor Pertambangan Rawan Korupsi.” Diakses pada 30 Januari 2025, <https://www.mongabay.co.id/2023/10/23/kala-tata-kelola-karut-marut-kajian-sebut-sektor-pertambangan-rawan-korupsi/>

“Pengawasan Lemah Picu Korupsi di Sektor Pertambangan,” diakses pada 30 Januari 2025, <https://transparansi.id/pengawasn-lemah-picu-korupsi-sektor-pertambangan/>

“Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kementerian PANRB Gelar Diseminasi Peraturan Terkait Pengelolaan Konflik Kepentingan.” Diakses pada 30 Januari 2025, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/wujudkan-tata-kelola-pemerintahan-yang-bersih-kementerian-panrb-gelar-diseminasi-peraturan-terkait-pengelolaan-konflik-kepentingan>

“Cara Menjadikan Pertambangan Smelter Menjadi Berkelanjutan”, diakses pada 30 Januari 2025, <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/cara-menjadikan-pertambangan-smelter-menjadi-berkelanjutan/>

“Sejarah Timah di Bangka dari Masa ke Masa.” Diakses pada 30 Januari 2025, <https://www.ekuatorial.com/2021/02/sejarah-timah-di-bangka-dari-masa-ke-masa/>

“Kementerian ESDM ctat ada 4.636 izin tambang minerba di Indonesia.” Diakses pada 30 Januari 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4461033/kementerian-esdm-catat-ada-4634-izin-tambang-minerba-di-indonesia>

“Kejagung Tetapkan 5 Korporasi Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Timah.” Diakses pada 30 Januari 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240404110413-4-528223/25-perusahaan-ini-aktif-ngeruk-timah-di-ri-termasuk-rbt#:~:text=Adapun%20IUP%20timah%20itu%20paling,PT%20Timah%20Tbk>

Kasus Korupsi Izin Tambang Timah Rguikan Lingkungan Hingga Rp271 Triliun.” Diakses pada 30 Januari 2025, <https://jdih.bpk.go.id/Info/Details/85c0ddcb-f7f9-4ff7-b7fa-609525231d67>

Haris Prabowo, “Greenpeace: UU Minerba Cederai Desentralisasi Daerah Era Rerformasi”, diakses pada 30 Januari 2025, <https://tirto.id/greenpeace-uu-minerba-cederai-desentralisasi-daerah-era-reformasi-fMe6>

“Ahli: UU Minerba Kriminalisasi Pembela HAM.” Diakses pada 30 Januari 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17949>

“Mengenal Konsep Sustainable Mining” CDE, diakses 30 Januari 2025, <https://cde-coal.com/insight-trend/detail/mengenal-konsep-sustainable-mining-1-49#:~:text=Konsep%20pertambangan%20berkelanjutan%20adalah%20pe ndekatan,lingkungan%2C%20sosial%2C%20dan%20ekonomi.>

Liputan6, “10 Negara Penghasil Timah Terbesar di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?” Liputan6, diakses 15 November 2024, <https://www.liputan6.com/hot/read/5585082/10-negara-penghasil-timah-terbesar-di-dunia-adalah-sebagai-berikut-indonesia-nomor-berapa?page=3>

Department of Mines, Industry Regulation and Safety, “Mining Act Legislation,” Government of Western Australia, accessed November 15, 2024, <https://www.dmp.wa.gov.au/Minerals/Mining-Act-legislation-14805.aspx>

Government of South Australia. “Regulating Mining Activity”, Departement for Energy and Mining, accessed November 15, 2024, <https://www.energymining.sa.gov.au/industry/minerals-and-mining/mining/regulating-mining-activity>

Australian Government, “Mining Industry,” accessed November 15, 2024, <https://business.gov.au/planning/industry-information/mining-industry>